



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Desember 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHYUNI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 89440

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 270.000.000

1. Tanah Seluas 850 m2 di HULU SUNGAI UTARA, HASIL SENDIRI  
Rp. 20.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/69 m2 di BALANGAN, HASIL  
SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 121.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T / SCOOTER Tahun 2013, HASIL  
SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 3C1 (V-XION) / SEPEDA MOTOR Tahun 2012,  
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T / SCOOTER Tahun 2017,  
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G M/T / MINI BUS Tahun 2014, HASIL  
SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 23.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 418.000.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 418.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.